

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak berkebutuhan khusus (ABK) sering kali mendapat perlakuan yang berbeda dalam hal layanan pendidikan, karena mereka dipandang memiliki hambatan dalam beberapa dimensi kehidupan sehingga dalam layanan pendidikannya harus terpisah dari anak-anak yang normal supaya proses pembelajaran tidak terganggu (Purwandari, 2009). Anggapan masyarakat yang seperti itu, menyebabkan bentuk layanan pendidikan pada ABK bersifat segregasi atau terpisah dari masyarakat pada umumnya, seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) yang di dalamnya terdapat spesialisasi-spesialisasi terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan hambatannya (Darma & Rusyidi, 2016).

SLB sebagai alternatif utama pendidikan untuk ABK pada umumnya berada di Ibu Kota Kabupaten, padahal ABK tersebar hampir di seluruh daerah (kecamatan atau desa) tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten. Akibatnya sebagian dari mereka yang kemampuan ekonomi orangtuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah, sementara kalau akan disekolahkan di sekolah terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 2007).

Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Tahun 2015 diketahui bahwa jumlah ABK di Indonesia mencapai 1.600.000 orang dan baru 164.000 ABK yang mendapat layanan pendidikan.

Artinya pemerintah baru mengakomodir sekitar 10-11 persen saja. Kenyataan ini menandakan bahwa akses ABK dalam dunia pendidikan masih terbatas. Permasalahan di atas dapat berakibat pada kegagalan program wajib belajar, yaitu tidak terlaksananya penyelenggaraan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah meliputi jenjang pendidikan SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat (Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008).

Untuk mengatasi permasalahan di atas kemudian munculah pendidikan integratif atau lebih dikenal dengan istilah pendidikan terpadu yakni pendidikan yang mengintegrasikan ABK masuk ke sekolah reguler, namun masih terbatas pada anak-anak yang mampu mengikuti kurikulum di sekolah tersebut (Darma & Rusyidi, 2016) dan difasilitasi dengan kehadiran guru pembimbing khusus (Suparno, 2008). Sekolah integratif menggunakan kurikulum yang sama untuk semua siswa, baik siswa normal ataupun siswa ABK (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 2007). Penggunaan kurikulum yang sama untuk semua siswa di sekolah integratif dikarenakan dalam sekolah integratif fokusnya masih pada individu anak, bukan pada sistem sekolah. Sehingga siswa ABK dipandang sebagai masalah dan harus disiapkan untuk integrasi, bukan sistem sekolahnya yang harus disiapkan. Sekolah integratif memiliki konsep yang serupa dengan sekolah seregratif yaitu berfokus pada upaya untuk mengubah anak, namun dalam praktek sekolah integratif yang memasukkan ABK ke dalam sekolah reguler sering dipandang sebagai perintis jalan menuju sekolah inklusi dan dapat mengarah pada perubahan sistem pendidikan (Stubbs, 2002).



Melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pemerintah memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi ABK. Pasal 15 tentang pendidikan khusus menjelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi ABK berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi (Pedoman Umum Penyelenggaraan Inklusi, 2007).

Sekolah inklusi merupakan sekolah yang menggunakan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan ABK belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Shevin dalam Ni'matuzahroh & Nurhamida, 2016). Istilah inklusi sendiri merupakan istilah yang terdengar lebih positif bagi anak-anak yang memiliki hambatan dibanding bila disebut dengan SLB karena mengandung diskriminatif dan ketidakberdayaan mereka (Ni'matuzahroh & Nurhamida, 2016). Sistem lembaga inklusi berusaha menyesuaikan kebutuhan khusus setiap anak dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Pendidikan inklusi mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan (Pedoman Umum Penyelenggaraan Inklusi, 2007).



Kesiapan mental komunitas sekolah untuk menerima kehadiran siswa ABK merupakan bagian yang sangat menentukan keberlangsungan pembelajaran di sekolah inklusi. Melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan pihak sekolah secara formal, sekolah berusaha memberikan pengetahuan dan membuka wawasan tentang inklusi pada guru, staf karyawan sekolah serta siswa normal. Kegiatan sosialisasi berisikan pemahaman tentang alasan sekolah menyelenggarakan sekolah inklusi dan manfaatnya bagi komunitas sekolah untuk mengubah cara pandang mereka terhadap ABK dan yang terpenting adalah memberikan pemahaman yang benar tentang hakekat pendidikan inklusi serta meyakinkan bahwa keberadaan siswa ABK di sekolah membawa banyak dampak yang positif (Ni'matuzahroh & Nurhamida, 2016).

Pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas sekolah melalui kegiatan sosialisasi akan melahirkan sikap penerimaan terhadap kehadiran siswa ABK, hal inilah yang menjadikan pentingnya diselenggarakan sosialisasi. Melalui sikap penerimaan ini akan tumbuh kesadaran hak siswa ABK untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama, mengembangkan empati terhadap siswa ABK serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemauan berbagi dengan siswa ABK. Tidak adanya penerimaan dari siswa normal terhadap kehadiran siswa ABK akan menimbulkan terjadinya *bullying* yang dilakukan oleh siswa normal pada siswa ABK (Ni'matuzahroh & Nurhamida, 2016).

Mengenai penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusi berdasarkan surat edaran Dikdasmen Despdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusi di setiap kabupaten atau kota



sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA dan SMK (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 2007). Namun belum meratanya bantuan teknis (keterlibatan dalam pelaksanaan: monitoring, pembimbingan maupun evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi) dan non-teknis (dana maupun peralatan) dari pemerintah baik pusat maupun daerah terkait pendidikan inklusi, menyebabkan jumlah sekolah inklusi masih sangat terbatas (Darma & Rusyidi, 2016). Keterbatasan sekolah inklusi tersebut menyebabkan masih ada ABK yang bersekolah di sekolah reguler terdekat.

Sekolah reguler merupakan sebutan untuk sekolah dengan program reguler atau sekolah yang menggunakan metode pembelajaran konvensional dengan pusat aktivitas pembelajaran berada di ruangan, antara lain: ruang kelas, ruang olah raga dan seni, serta ruang laboratorium (Dien, 2015). Sistem pendidikan di sekolah reguler menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di sekolah reguler. Dengan kata lain, sekolah reguler menuntut anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan sekolah reguler (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 2007).

Sekolah reguler sebenarnya merupakan layanan pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak normal (Baedowi, 2015). Keadaan tersebut menjadikan sekolah reguler tidak menyediakan guru khusus untuk siswa ABK. Ketiadaan guru pembimbing khusus bagi siswa ABK mengakibatkan siswa ABK yang



bersekolah di sekolah reguler berisiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Selain itu kelemahan sekolah reguler bagi siswa ABK yaitu siswa ABK tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individualnya. Meskipun demikian, di sekolah reguler siswa ABK mendapatkan keuntungan untuk bisa bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 2007).

Praktik pendidikan yang memberikan peluang terjalinnya interaksi antara siswa normal dengan siswa ABK baik di sekolah reguler maupun inklusi memberikan dampak positif. Dampak positif tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh siswa ABK saja, melainkan juga pada siswa normal. Dampak positif bagi siswa ABK adalah meningkatkan gambaran diri siswa ABK, siswa ABK menjadi lebih positif, keterampilan sosial siswa ABK menjadi lebih baik, siswa ABK menjadi lebih sering berinteraksi dengan teman-teman sebaya yang normal, memiliki perilaku yang sesuai di kelas serta memiliki prestasi akademik yang setara (kadang kala lebih tinggi) dengan prestasi yang mereka capai ketika berada di kelas khusus. Sedangkan, dampak positif bagi siswa normal dalam interaksi tersebut adalah tumbuhnya kesadaran mengenai hakekat perbedaan manusia yang heterogen dan tumbuhnya kesadaran bahwa siswa ABK memiliki banyak kesamaan dengan mereka (Ni'matuzahroh & Nurhamida, 2016).

Proses interaksi sosial yang terjadi antara siswa ABK dengan siswa normal selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut yaitu rentannya perilaku *bullying* siswa normal terhadap siswa ABK. Sebuah artikel yang berjudul *bullying and children and youth with*



disabilities and special health needs mengungkapkan bahwa anak dengan fisik, perkembangan intelektual, emosional dan sensori yang mengalami hambatan akan lebih rentan di-bully oleh teman sebayanya. Efek selanjutnya bully yang dialami ABK menyebabkan siswa ABK tidak ingin masuk kuliah, siswa ABK takut untuk bermain dengan temannya, siswa ABK dikucilkan oleh siswa reguler. Penelitian oleh Salend (dalam Ni'matuzahroh & Nurhamida, 2016) juga menemukan fakta bahwa keterbatasan dan keistimewaan siswa ABK di kelas inklusi menjadikan siswa ABK rentan mendapatkan *bullying* dari siswa normal apalagi siswa ABK tidak memahami bahwa *bullying* dari siswa normal adalah sesuatu yang buruk.

Penelitian yang dilakukan oleh Murni (2012) dengan judul Studi Perilaku *Bullying* Siswa di SDN Inklusi Kota Surabaya, menemukan adanya kasus *bullying* yang dilakukan oleh siswa di Sekolah Dasar Inklusi meliputi perilaku *bullying* fisik sebesar 27,05% dilakukan oleh siswa normal dan 28,29% dilakukan oleh siswa ABK. Perilaku *bullying* verbal sebesar 46,87% dilakukan oleh siswa normal dan 28,53% dilakukan oleh siswa ABK. Perilaku *bullying* psikologis sebesar 32,49% dilakukan oleh siswa normal dan 17% dilakukan oleh siswa ABK.

Menurut berita yang diangkat *News Okezone*, 9 Mei 2016 di sekolah reguler, *bullying* pada ABK pernah dialami oleh seorang siswa kelas VIII *Sinarmas World Academy (SWA) International School*. Ia sering di-bully teman-temannya, diejek autis (meskipun sebenarnya ia mengalami ADHD) sehingga siswa ABK tersebut marah dan mengamuk di kelas. Perilaku siswa ABK yang



seperti itu membuat pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkannya dari sekolah. Alasan yang dikemukakan oleh pihak *Sinarmas World Academy (SWA) International School* dikarenakan tidak adanya tenaga ahli di bidang ABK. Keputusan pihak sekolah disayangkan oleh ayah dari siswa ABK tersebut, karena sejak awal pihak sekolah sudah bersedia menerima anaknya sebagai peserta didik walaupun mengetahui bahwa anaknya menderita *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*.

Bullying yang dilakukan oleh siswa normal pada siswa ABK baik di sekolah inklusi maupun reguler terjadi karena kurangnya empati yang dimiliki oleh siswa normal terhadap siswa ABK dan tingginya tingkat agresivitas siswa normal pada siswa ABK. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Saripah (2010), yang menyatakan bahwa karakteristik pelaku *bullying* adalah orang yang memiliki kemampuan empati yang rendah serta tingkat agresivitas yang tinggi. Kemampuan empati yang rendah ditunjukkan dengan menunjukkan sikap senang melihat orang lain dalam kesulitan, tidak merasa bersalah setelah menyakiti fisik atau hati orang lain, mengutamakan kepentingan diri sendiri, tidak menunjukkan penghargaan pada orang lain, tidak memikirkan konsekuensi dari suatu perbuatan dan senang menonjolkan diri.

Penelitian yang dilakukan oleh Salim (2013) yang berjudul hubungan antara empati dengan perilaku *bullying* dan *defending* terhadap siswa dengan ASD diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara empati dan perilaku *bullying*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi empati yang dimiliki siswa normal terhadap siswa ABK, maka akan



semakin rendah kecenderungan untuk melakukan perilaku *bullying* terhadap siswa ABK. Ia menambahkan bahwa semakin tinggi empati siswa normal terhadap siswa ABK maka akan semakin tinggi pula kecenderungan melakukan perilaku *defending* terhadap siswa ABK yang menjadi korban *bullying*.

Rendahnya empati pada siswa normal baik di sekolah inklusi maupun reguler yang menyebabkan *bully* terhadap siswa ABK, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (dalam Republika.co.id, 2016) yang menemukan fakta bahwa anak normal yang berinteraksi paling tidak dua tahun dengan ABK akan mengembangkan empati mereka. Hal tersebut juga bertentangan dengan penelitian Laksana (2009) yang menunjukkan bahwa secara tidak langsung pendidikan di sekolah inklusi membawa dampak pada karakter anak, khususnya pada rasa empati.

Hoffman (dalam Taufik 2012) mendefinisikan empati sebagai salah satu atribut dasar yang harus dimiliki seseorang untuk mendukung kehidupan sosialnya. Kemampuan empati sangatlah penting bagi setiap individu sebagai bentuk menghadapi perbedaan dalam kehidupan sosial. Seseorang dapat diterima oleh orang lain jika dia mampu memahami kondisi (perasaan) orang lain dan memberikan perlakuan yang semestinya sesuai dengan harapan orang tersebut (Haq, 2010).

Kemampuan empati perlu diasah setiap orang agar dirinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Pembelajaran empati dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah (Haq, 2010).



Baron dan Byrne (2005) mengemukakan bahwa sekolah merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi tumbuhnya empati. Sejalan dengan pendapat tersebut Solfema (2013) menyatakan bahwa sekolah melalui budaya sekolah yang ada berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian siswa, salah satunya yaitu kemampuan berempati terhadap orang lain. Oleh karenanya pengelola sekolah terutama guru dituntut untuk dapat memelihara pola pikir dan tindakannya yang mendukung berkembangnya tingkat kemampuan empati siswa.

Sekolah melalui kurikulum yang diterapkan juga mampu mempengaruhi terbentuknya empati. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noni (2010) yang berjudul Perbedaan Empati antara Mahasiswa Kependidikan dan Non Kependidikan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa empati mahasiswa kependidikan tergolong tinggi yaitu sebesar 71,7% dan *mean* sebesar 115,85 sedangkan mahasiswa non kependidikan sebesar 65% dan *mean* sebesar 107,817. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan empati yang signifikan antara mahasiswa kependidikan dan mahasiswa non kependidikan. Hal ini berarti satu sekolah yang memiliki kurikulum yang berbeda dengan sekolah lainnya akan membuat perbedaan empati antar kelompok siswa di kedua sekolah tersebut.

Selain penelitian di atas, Romawati (2012) juga melakukan penelitian mengenai perbedaan perilaku prososial dan empati siswa *homeschooling* dengan siswa sekolah formal Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan uji-t perilaku prososial sebesar 8,178 dan uji-t empati sebesar 6,769. Yang berarti terdapat perbedaan perilaku prososial dan empati siswa *homeschooling* dengan



siswa sekolah formal. Pada siswa *homeschooling* perilaku prososial secara umum nilai rata-ratanya 17,79 sedangkan pada siswa sekolah formal nilai rata-ratanya 20,55. Pada siswa *homeschooling* secara umum nilai rata-rata empati sebesar 29,79 sedangkan pada siswa sekolah formal nilai rata-rata empati sebesar 33,71.

Pentingnya empati sebagai salah satu karakteristik yang harus dimiliki individu untuk meminimalisir terjadinya perilaku *bullying* serta sebagai kemampuan sosial telah diuraikan di atas. Dijabarkan pula mengenai perbedaan sekolah inklusi dan sekolah reguler terkait dengan siswa ABK yang diduga akan mempengaruhi empati siswa pada kedua sekolah tersebut. Oleh sebab itu pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk menguji secara empiris mengenai perbedaan empati siswa normal terhadap anak berkebutuhan ditinjau dari jenis sekolah (inklusi dan reguler).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbedaan empati siswa normal terhadap anak berkebutuhan ditinjau dari jenis sekolah (inklusi dan reguler)?”

1.3 Tujuan penelitian

Ditinjau dari permasalahan penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan empati siswa normal terhadap anak berkebutuhan ditinjau dari jenis sekolah (inklusi dan reguler).



1.4 Manfaat penelitian

Dari berbagai hal yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat menambah perluasan teori di bidang ilmu psikologi mengenai perbedaan empati siswa normal terhadap anak berkebutuhan ditinjau dari jenis sekolah (inklusi dan reguler). Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber kepustakaan penelitian di bidang psikologi, khususnya psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat :

a) Bagi subjek penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi siswa terlebih untuk siswa normal. Bahwa empati terhadap anak berkebutuhan khusus akan mendorong siswa menerima dan menghargai perbedaan yang ada sehingga menghambat kecenderungan perilaku agresif terhadap anak berkebutuhan khusus. Terlebih lagi empati merupakan kemampuan sosial yang mampu menjadi kunci dalam keberhasilan bergaul dan bersosialisasi di masyarakat. .

b) Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya peran sekolah dalam menumbuhkan empati siswa terlebih



empati siswa normal terhadap anak berkebutuhan khusus. Apalagi empati siswa normal terhadap anak berkebutuhan khusus perlu dikembangkan disekolah agar tercipta suasana belajar yang kondusif sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah baik sekolah inklusi maupun sekolah reguler dalam menyelenggarakan program-program atau pelatihan-pelatihan yang membantu menumbuhkan dan mengembangkan rasa empati siswa normal.

c) Bagi dinas pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kementrian Pendidikan Nasional dalam tercapainya kurikulum tentang pembelajaran pendidikan karakter dan budi pekerti pada sekolah inklusi dan reguler.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perbedaan empati siswa normal terhadap anak berkebutuhan ditinjau dari jenis sekolah (inklusi dan reguler). Sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti yang tertarik meneliti mengenai perbedaan empati siswa normal terhadap anak berkebutuhan ditinjau dari jenis sekolah (inklusi dan reguler).

